



RADAR BALI

Kasus Dauh Puri Kelod Gabeng

Beredar Kabar Dilimpahkan ke Kejari

DENPASAR - Sebulan lebih dilaporkan ke Kejati Bali, kasus dugaan korupsi dana APBDes Desa Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat, masih gabeng alias belum ada kejelasan. Informasi teranyar yang diterima koran ini, Kejati Bali melimpahkan penyelidikan kasus tersebut ke Kejari Kota Denpasar.

"Informasi yang saya terima, kasus dugaan korupsi di desa saya dilimpahkan ke Kejari Denpasar oleh Kejati Bali, dengan alasan kerugian (negara) di bawah Rp 1 miliar," kata I Nyoman Mardika, warga yang melaporkan kasus ini ke Kejati Bali, kemarin (8/3).

Menurut Mardika, sejak menerima surat tanda bukti laporan diterima dari Kejati Bali pada 16 Januari silam, pihaknya belum mendapat perkembangan hasil penelitian. Mardika mengaku khawatir dengan pelimpahan ke Kejari Denpasar, akan membuat kasus ini mentok menemui jalan buntu. Ini berkaca pada dugaan kasus korupsi di Kota Denpasar periode sebelumnya, biasanya jalan di tempat tidak sampai ke pengadilan. Misalnya, dugaan korupsi dana di Dinas Pariwisata Kota Denpasar.

"Kalaupun toh dilimpahkan ke Kejari Denpasar, jangan sampai kasus ini mentok. Saya berharap kasus ini bisa tuntas sampai ke pengadilan agar gamblang semuanya. Sebagai

warga dan pelapor, saya siap bersaksi," tegas Klian Dinas Banjar Batu Bintang, itu.

Selanjutnya, Mardika mengaku siap dipanggil Kejati Bali maupun Kejari Denpasar untuk membantu pengungkapan kasus. Mardika menegaskan, pihaknya tidak ada tendensi apapun dalam kasus ini. Apa yang dia lakukan hanya murni tanggung jawab moral sebagai warga desa yang mengetahui kasus ini. "Harapan saya satu, agar tindakan koruptif tidak dibiarkan. Apalagi, kasus ini sangat memengaruhi APBDes Dauh Puri Kelod," tukasnya.

Sementara itu, Kasipenkum dan Humas Kejati Bali, Edwin Beslar yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, belum ada informasi masuk dari

bagian tindak pidana khusus (pidsus) yang menangani kasus ini. "Senin depan, akan kami pastikan kebenaran informasi tersebut," jelas Edwin.

Ditanya apakah benar kasus yang ditangani Kejati Bali bisa dilimpahkan ke Kejari Denpasar, dengan alasan nilai kerugian negara di bawah Rp 1 miliar, Edwin menegaskan bahwa di kejaksaan tidak mengenal aturan seperti itu. Aturan tersebut biasanya dipakai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lazimnya KPK hanya menangani kasus yang nilainya di atas Rp 1 miliar.

Menurut Edwin, kalapun perkara dilimpahkan bukan karena nilai kerugian di bawah Rp 1 miliar. "Kalau seandainya dilimpahkan (dari Kejati Bali ke Kejari

Denpasar), maka itu lebih menyangkut kewilayahan agar penanganannya lebih cepat," tandasnya seraya kembali menyebut untuk kepastian kabar pelimpahan dicek Senin mendatang.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mardika mengungkapkan dugaan korupsi ini bermula dari evaluasi internal dana APBDes 2017. Dari hasil audit internal itu ditemukan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 1,95 miliar. Namun, setelah dimintai pertanggungjawaban, perangkat desa yakni perbekel, bendahara, dan kaur keuangan tidak bisa menunjukkan jumlah uang Rp 1,95 miliar. Dana yang tersedia hanya Rp 900 juta. (san/yor)

Edisi : Sabtu, 9, Mar, 2019

Hal : 5



Mardika: Jangan Sampai Mentok

■ Kejati Bali Limpahkan Dugaan Korupsi APBDes Dauh Puri Kelod ke Kejari Denpasar

DENPASAR, TRIBUN BALI

- Penanganan dugaan korupsi dana APBDes Desa Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat kini beralih. Sebelumnya perkara ini ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, telah dilimpahkan ke Kejari Denpasar.

"Informasi yang saya terima, kasus dugaan korupsi di desa saya dilimpahkan ke Kejari Denpasar oleh Kejati Bali, dengan alasan kerugian negara di bawah Rp 1 miliar," ungkap tokoh masyarakat Desa Dauh Puri Kelod, Nyoman Mardika yang juga pelapor, Jumat (8/3).

Namun dia menjelaskan, pasca melaporkan dan menerima surat tanda bukti laporan dari Kejati Bali pada 16 Januari 2019 lalu, belum mendapat perkembangan hasil penelitian. "Kalaupun dilimpahkan ke Kejari Denpasar, jangan sampai kasus ini mentok. Saya berharap kasus ini bisa tuntas sampai ke pengadilan agar gamblang. Sebagai warga dan pelapor, saya siap bersaksi," kata Mardika.

Mardika menegaskan, siap dipanggil Kejati maupun Kejari Denpasar untuk membantu pengungkapan kasus. Dikatakannya, tidak ada tendensi apapun dalam kasus ini. Apa yang ia lakukan murni bentuk tanggung jawab moral sebagai warga desa yang mengetahui kasus ini. "Harapan saya satu, agar tindakan koruptif tidak dibiarkan. Apalagi, kasus ini sangat mempengaruhi APBDes Dauh Puri Kelod," jelasnya.

Terpisah, Kasipenkum dan Humas Kejati Bali, Edwin Beslar mengatakan, belum ada informasi masuk dari bagian tindak pidana khusus (Pidsus) yang menangani kasus ini. "Senin depan, akan kami pastikan kebenaran informasi tersebut," ujarnya saat dikonfirmasi.

Ditanya apakah benar kasus yang ditangani Kejati Bali bisa dilimpahkan ke Kejari Denpasar, dengan alasan nilai kerugian negara di bawah Rp 1 miliar, Edwin menyatakan, di kejaksaan tidak mengenal aturan seperti itu. Aturan tersebut biasanya dipakai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lazimnya KPK hanya menangani kasus yang nilainya di atas Rp 1 mi-

liar.

Menurut Edwin, jika perkara dilimpahkan, bukan karena nilai kerugian di bawah Rp 1 miliar. "Seandainya dilimpahkan, maka itu lebih menyangkut kewilayahan agar penanganannya lebih cepat," paparnya.

Informasi yang dihimpun *Tribun Bali* dari sumber internal di Kejari Denpasar memang menyatakan, perkara dugaan korupsi Desa Dauh Puri Kelod penanganannya kini ditangani tim pidana khusus (Pidsus) Kejari Denpasar. "Sebelumnya kan ditangani Kejati Bali. Lalu (penanganan) dilimpahkan ke Kejari Denpasar," tutur sumber tersebut.

Namun dia tidak berani lebih jauh menjelaskan alasan penanganan kasus ini dilimpahkan dari Kejati Bali ke Kejari Denpasar. "Kalau karena kerugian negara di bawah Rp 1 miliar itu menjadi alasan, saya kurang tahu. Lebih baik konfirmasi ke pihak yang berwenang memberikan informasi," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, awal mula perkara ini dilaporkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus dari Inspektorat Kota Denpasar. Mengacu pada LHP Khusus Inspektorat Kota Denpasar ditemukan selisih Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2017 di Desa Dauh Puri Kelod. Nilainya mencapai Rp 1 miliar lebih.

Menurut Mardika, pada bulan Mei 2017 dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kota Denpasar. Termasuk monitoring di Desa Dauh Puri Kelod untuk anggaran tahun 2012 sampai 2016. "Dari hasil monitoring DPMD laporan tahun 2017 ditemukan selisih SILPA tahun 2016 Rp 1,8 miliar. Dari SILPA Rp 1,8 miliar itu, tidak ada uangnya kisaran Rp 900 juta lebih," ungkapnya.

Selanjutnya desa membentuk tim penelusuran, mencari selisih. Dari audit internal, kata Mardika, setelah melalui proses SPJ yang ada, memang terindikasi adanya penyimpangan. Hanya saja, pada waktu itu, tim belum



Sambungan

Mardika: Jangan Sampai...

Sambungan Hal.8

berani menyampaikan finalisasi hasil temuan. "Diduga ada (penyimpangan) dan telah ada pengakuan dari bendahara, bahwa ada pemakaian dana APBDes. Hanya dia tidak tahu secara pasti berapa anggaran yang digunakan. Waktu itu kami belum berani menyampaikan ke publik, karena ada pejabat di Kota Denpasar meminta hal ini jangan dulu diungkap," terangnya.

Terkait kasus itu, Mardika tidak melaporkan orang per orang. Memang dalam dugaan ini Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dijabat oleh perbekel. "Secara kebetulan, perbekel kami yang lama ini mencalonkan diri sebagai Caleg di DPRD Kota Denpasar. Perkebel kan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Masalah dia terlibat atau tidak, saya tidak berani menyatakan itu. Yang saya laporkan adalah dugaan korupsi di Desa Dauh Puri Ke-

lod," tegasnya.

Kembali menjelaskan hasil temuan dari tim penelusuran kasus bentukan desa itu, Mardika yang ikut menjadi anggota tim, bertemu dengan Wakil Walikota Denpasar. Kemudian Wakil Walikota memerintahkan inspektorat untuk melakukan proses pemeriksaan. Target waktu pemeriksaan dua bulan, dan hasil pemeriksaan dari inspektorat dilaporkan ke Walikota tanggal 28 Agustus 2018.

Selain ke Walikota, berdasarkan aturan dikatakan Mardika, Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) seharusnya juga melaporkan hasil itu kepada aparat penegak hukum. "Dua bulan setelah 60 hari kerja ketika sudah hasil, dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Ini dari bulan Agustus 2018 sampai adanya laporan tanggal 7 Januari 2019 kemarin,

menurut jaksa belum ada tembusan LHP Khusus dari Inspektorat Kota Denpasar," bebarnya.

Berdasarkan LHP Khusus dari Inspektorat Kota Denpasar itu, selisih SILPA tahun 2017 Rp 1.950.133.000. Dana yang diduga hilang Rp 1.035.000.000. "Disebutkan ada tiga orang yang diduga harus bertanggungjawab," terang Mardika.

Namun demikian, mengenai dugaan keterlibatan orang-orang tersebut, Mardika menyatakan tidak berkompeten menilai. "Silakan nanti aparat penegak hukum yang menindaklanjuti. Saya berharap dugaan korupsi ini segera ditindaklanjuti. Saya akan pantau dan berkoordinasi mengenai tindak lanjut dari kejaksaan. Saya melakukan laporan ini, agar tidak terjadi di desa-desa lain baik di tingkat kota maupun provinsi," ucapnya. (can)

Edisi : Sabtu 9 Maret 2019

Hal : 7



Wayan Baru Laporkan Muka atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Semarapura (Bali Post) -

Pelaporan Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru ke Polda Bali atas dugaan penyelewengan dana hibah bansos berbuntut panjang. Pihak terlapor yakni Wayan Baru. Minggu (10/3) kemarin memilih melaporkan balik I Wayan Muka Udiana atas dugaan pencemaran nama baik. Wayan Baru melaporkan Wayan Muka ke Polres Klungkung.

Wayan Baru melapor didampingi dua pengacara yakni Wayan Suniata dan Ketut Widia. Begitu tiba, mereka langsung ke ruangan Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Mapolres untuk membuat laporan. Setelah di SPKT, politisi bertubuh kekar ini kemudian dimintai keterangan oleh penyidik di ruang Sat Reskrim Polres Klungkung.

Seusai dimintai keterangan sekitar pukul 11.45 Wita, politisi asal Dusun Cemulik, Desa Sakti, Nusa Penida ini mengaku datang ke Mapolres karena tidak terima dilaporkan ke Polda Bali oleh I

Wayan Muka Udiana terkait masalah hibah yang difasilitasi di Nusa Penida. Apalagi, menurut Baru, dari lima objek yang dilaporkan, ada empat yang dianggap fiktif karena bukan difasilitasi oleh dirinya. "Hanya satu di Dadia Pura Arya Kenceng yang saya fasilitasi dan itu sudah tidak ada persoalan karena diberikan waktu perpanjangan oleh BPK untuk pembangunannya," katanya.

Menurut Baru, dirinya juga datang ke Mapolres agar masyarakat tidak terprovokasi. Apalagi sekarang memasuki bulan politik.

Dia pun menginginkan agar Klungkung tetap kondusif. "Saya juga datang ke Mapolres ingin membuktikan kalau saya tidak bersalah terkait penggelapan dana hibah. Jangankan menggelapkan, itu saja (pembangunan) masih berproses," katanya.

Yang jelas, Baru mengatakan melaporkan I Wayan Muka Udiana atas kasus pencemaran nama baik. Bahkan untuk mendukung laporannya, Baru juga menyertakan bukti-bukti berupa berita di media *online* dan klipingan koran terkait dirinya yang dilaporkan Wayan Muka ke Polda Bali.

"Untuk tuntutan yang lain kami belum pikirkan. Kami fokus dulu dengan masalah ini," katanya.

Begitu pula ketika ditanya soal ada tidaknya upaya damai jika dari pihak Muka meminta maaf. "Nanti saja. Saya belum ada kepikiran ke sana. Saya akan rembuk dulu dengan pengacara saya. Tapi Tuhan saja bisa memaafkan, kenapa kita tidak bisa memaafkan," katanya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Klungkung AKP Mirza Gunawan ketika dikonfirmasi mengaku belum menerima laporan terkait laporan Ketua DPRD I Wayan Baru lantaran masih berada di luar Mapolres. Meski demikian, pihaknya bakal mengecek laporannya. "Saya masih di luar. Nanti saya cek dulu laporannya," ujar Mirza Gunawan. (kmb)

Edisi : Senin, 11, Mar, 2019

Hal : 12



Badung Anggarkan Rp 2,2 Miliar untuk VAR

★ Geber Vaksinasi Massal pada April 2019

MANGUPURA, NusaBali

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung terus berupaya agar Badung sebagai daerah tujuan wisata internasional bebas dari rabies. Salah satu upaya adalah dengan melakukan vaksinasi serentak terhadap hewan penular rabies (HPR) pada April 2019 mendatang. Pemkab Badung menganggarkan Rp 2,2 miliar untuk pengadaan 45.000 dosis vaksin anti rabies (VAR).

Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung I Putu Oka Swadiana, mengatakan program vaksinasi massal merupakan tindak lanjut komitmen tuntas rabies di Bali oleh Direktorat Jenderal Perternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI bersama Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. "Maka atas komitmen itu, kami di Badung juga mengagendakan vaksinasi massal mulai bulan depan (April)," ungkapnya, Minggu (10/3).

Demi suksesnya program vaksinasi massal tersebut, kata Swadiana, saat ini tengah mengajukan pelelangan sebanyak 45.000 dosis vaksin rabies untuk enam kecamatan se-Badung, yakni Kecamatan Petang, Abiansemal, Mengwi, Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan. "Anggarannya berasal dari APBD Badung, senilai Rp 2,2 miliar lebih,"

katanya. "Tapi nanti ada juga bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi," imbuhnya.

Swadiana mengatakan, pada 2018 program vaksinasi massal juga telah digeber. Menyasar sedikitnya 87.000 ribu anjing. "Tapi itu baru sekitar 85 persen dari total populasi yang ada, sekitar 92.000. Karenanya vaksinasi kami lanjutkan tahun ini," ungkapnya.

"Di samping melakukan penyisiran terhadap yang belum divaksin, kami akan lakukan vaksin lagi terhadap yang sudah tervaksin sebelumnya. Kalau jumlah vaksin dirasa kurang, maka akan ditambah pada anggaran perubahan," kata Swadiana.

"Pada tahun 2018 memang sempat ditemukan dua ekor anjing positif rabies. Ditemukan di Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang dan di Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan. Tapi telah diatasi dengan baik," tegasnya.

Di sisi lain, Swadiana juga menyambut baik pengadaan vaksin anti rabies (VAR) yang dilakukan Dinas Kesehatan Badung sebanyak 7.843 vial senilai Rp 2 miliar. "Walaupun stok masih ada, namun hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi ketersediaan VAR, mengingat Kabupaten Badung sebagai kabupaten yang mengandalkan sektor pariwisata, jangan sampai ada kasus positif rabies," tandas Swadiana. **asa**

Edisi : Senin, 11, Mar, 2019

Hal : 2



Pasar Amlapura Ditender Awal April ✓

● Gunakan Dana Induk APBD Rp 16,8 Miliar

AMLAPURA, TRIBUN

BALI - Perbaikan Pasar Amlapura Barat, Kelurahan / Kecamatan Karangasem bakal ditender awal April 2019. Hal itu diungkapkan Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag) Karangasem, Gusti Ngurah Suarta, Minggu (10/3).

"Sekarang masih persiapan tender. DED dan RAB sudah selesai. April sudah tender. Kemungkinan Mei minggu kedua dikerjakan. Tahun 2020 kemungkinan sudah bisa beroperasi," kata Gusti Ngurah Suarta, pejabat asal Banjarangkan, Klungkung.

Sesuai *Detail Engineering Design* (DED), Pasar Amlapura



ISTIMEWA

BOCOR - Kondisi Pasar Amlapura Barat, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem. Beberapa atap pasar terlihat bocor.

pura Barat dibangun dua lantai. Harapannya pedagang pakaian dan sayur sebanyak 150 di Pasar Amlapura Barat bisa tertampung. Perbaikan Pasar Amlapura Barat menggunakan dana In-

duk APBD Kabupaten 2019. Nominalnya sebesar Rp 16,8 miliar. Bentuknya kemungkinan hampir sama dengan Pasar Amlapura Timur. Lantai I dan lantai II rencananya digunakan untuk

para pedagang.

"Jalanan kemungkinan akan dibuat melingkar sehingga kendaraan bisa keluar masuk. Pedagang bisa membawa barang ke dalam. Semoga proses tender bisa berjalan lancar sehingga pengerjaan bisa lebih cepat selesai dan bisa beroperasi," harap Suarta.

Beberapa pedagang di Pasar Amlapura Barat menyambut antusias rencana perbaikan ini. Sebelumnya, pemda sempat merenovasi Pasar Amlapura Barat, namun hanya di bagian atapnya saja. Saat ini kondisi Pasar Amlapura Barat rusak parah. Kayu penopang bangunan keropos. (ful)

Edisi : Senin, 11, Mar, 2019

Hal : 5



RADAR BALI

Bangun Command Centre, Siapkan Rp 5 Miliar

SINGARAJA - Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian (Kominfo Sandi) Buleleng menyiapkan anggaran sedikitnya Rp 5 miliar, untuk pembangunan Buleleng Command Centre. Sedianya gedung tersebut akan dibangun tahun ini, setelah dokumen *detail engineering design* (DED) rampung disusun.

Kepala Dinas Kominfo Sandi Buleleng Ketut Suweca mengatakan, gedung itu akan dibangun di parkir barat Kantor Bupati Buleleng. Tepat di sebelah barat Lobi Atiti Wisma Kantor Bupati Buleleng. Gedung

yang ada di parkir barat, rencananya akan diratakan. Sementara koperasi dan *mailing room* yang ada di areal tersebut, akan dipindahkan ke tempat lain.

"Kami memanfaatkan lahan seluas 4,5 are dan dibangun dua lantai. Tahun ini pasti dibangun. Anggarannya sudah ada. Kami tinggal menunggu penyusunan DED selesai," kata Suweca saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (11/3).

Sementara untuk pengadaan perangkat elektronik, server, serta jaringan *fiber optic*, rencananya akan

dilakukan pada tahun 2020 mendatang. Diperkirakan Buleleng Command Centre baru bisa beroperasi penuh pada pertengahan tahun 2020.

"Memindahkan server dan menyiapkan jaringan itu *kan* butuh waktu. Paling cepat pertengahan tahun 2020 sudah bisa digunakan. Nanti Dinas Kominfo Sandi juga akan berkantor di gedung Command Centre itu," imbuh Suweca.

Lebih lanjut Suweca menjelaskan BCC akan menjadi pusat data milik pemerintah di Kabupaten Buleleng. Data-data yang selama

ini tersebar di beberapa dinas, akan dihimpun menjadi satu di Command Centre. Data-data tersebut akan diolah menjadi bentuk digital, sehingga lebih mudah diakses. Selain itu Command Centre juga akan menjadi lokasi penyimpanan server milik pemerintah. Selama ini server-server data milik pemerintah, disimpan oleh masing-masing dinas. Pemusatan server akan memudahkan pemerintah mengelola dan memelihara aplikasi. Terlebih kini ada 54 buah aplikasi yang dikelola pemerintah. (eps/gup)

Edisi : Selasa, 12 Maret 2019

Hal : 2



RADAR BALI

Warga Kembalikan Dana Hibah

Ngaku Tak Mampu Selesaikan Pembangunan Tepat Waktu

SEMARAPURA- Sejumlah warga penerima dana hibah APBD Perubahan 2018 di Klungkung mengembalikan dana hibah yang diterima mereka ke kas daerah, Senin (11/3). Mereka mengaku tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang dianggarkan menggunakan dana hibah tepat waktu.

Menariknya, ada warga asal Kecamatan Nusa Penida menenteng kantong plastik berwarna hitam berisi tumpukan uang ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Klungkung. Penerima hibah

yang enggan menyebutkan nama itu, mengaku mengembalikan dana hibah yang diperolehnya lantaran waktu pelaksanaan tidak cukup. Sambil terus berjalan menenteng kantong plastik berisikan uang, ia mengaku akan melakukan transfer uang ke bank.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Klungkung, I Wayan Sumarta saat dikonfirmasi membenarkan. Sumarta mengatakan, pengembalian dana hibah berlangsung dari Februari 2019 lalu. Hingga kemarin siang, tercatat sudah delapan penerima hibah mengembalikan dana hibah yang mereka peroleh. "Total dana hibah yang telah dikembalikan hingga Senin

siang sebanyak Rp 1 miliar lebih," kata Sumarta.

Sementara itu, Bendahara Bantuan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Klungkung, Gusti Ayu Purnami menambahkan para penerima hibah mengaku mengembalikan dana hibah yang mereka peroleh lantaran merasa tidak mampu melakukan pekerjaan tepat waktu. "Tanpa saya bertanya mereka langsung bilang karena merasa tidak mampu melakukan pengerjaan karena waktu sudah lewat dan tidak cukup. Mereka mengaku biar tidak ada masalah," ujarnya.

Terkait adanya penerima hibah asal Kecamatan Nusa Penida yang terlihat membawa uang tunai terbungkus kantong plastik,

Purnami membenarkan. Bahkan sebelumnya ada juga penerima hibah yang melakukan hal serupa saat mengembalikan dana hibah tersebut. Padahal menurutnya pengembalian dana hibah harus dilakukan secara transfer ke kas daerah. "Karena pengembalian itu kami catat setelah menerima Surat Tanda Setoran (STS). Sehingga kami minta ke bank untuk melakukan transfer. Saya juga ketakutan disodorkan uang sebanyak itu. Tadi (kemarin) yang mau dikembalikan dana hibah Pura Paibon di Dusun Cemulik, Nusa Penida sebesar Rp 420 juta," ungkapnya.

Sumarta menambahkan, sebelum pencairan dilakukan para penerima hibah di setiap kecamatan

telah dikumpulkan untuk diberikan sosialisasi mengenai pemanfaatan dana hibah tersebut. Begitu juga sebelum dicairkan, pihaknya memastikan penerima hibah bisa menyelesaikan pekerjaan yang akan didanai dengan dana hibah ini tepat waktu. Namun ternyata masih ada penerima hibah yang memaksakan diri dan akhirnya mengembalikan dana hibah tersebut setelah melihat kenyataan yang ada. "Kalau tidak bisa, maka tidak usah dicairkan. Tidak ada batas waktu pengembalian ketika mereka tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Namun di sini kan ada tim monev yang melakukan pengecekan," tandasnya. (ayu/dot)

Edisi : Selasa, 12 Maret 2019

Hal : 2



Anggaran Eskalator Pasar Bertambah Rp 300 Juta



Blok A Pasar Semarapura, Klungkung akan dipasang eskalator. • IST

SEMARAPURA, NusaBali

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Perdagangan Klungkung akhirnya merevisi anggaran proyek pengadaan eskalator di Blok A Pasar Semarapura, Klungkung. Revisi untuk penambahan anggaran dari Rp 1,5 miliar menjadi Rp 1,806 miliar atau bertambah Rp 300 juta lebih.

Penambahan itu karena ada tambahan AC blower, penghalau cahaya masuk penambahan pagar pembatas. Sebagaimana diketahui, pengadaan eskalator ini sudah dua kali gagal tender karena sepi kontraktor penawar.

Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Klungkung I Wayan Ardiasa mengatakan, revisi anggaran tersebut dari

Rp 1.500.000.000 menjadi Rp 1.806.309.321. Revisi anggaran ini ditopang pergeseran anggaran satu digit proyek perencanaan. Karena setelah dicroscek, pembangunan Pasar Hewan di Pasar Mentigi, Nusa Penida, yang perencanaannya dibangun permanen ternyata tidak bisa. Mengingat pembangunannya di areal sepadan pantai, sehingga harus dibangun semi permanen. "Dana itu kami geser untuk eskalator, tapi masih dalam satu digit," ujar Ardiasa kepada NusaBali, Senin (11/3).

Diharapkan, dengan revisi ini ada banyak kontraktor yang menawar saat proses tender selanjutnya. Proyek ini kembali gagal tender pada tahap kedua. Pengumuman tender tahap kedua 9 - 16

Januari 2019. Karena dari 18 rekanan yang daftar ada satu rekanan yang mengajukan penawaran, tapi tidak memenuhi persyaratan. Proyek pengadaan eskalator ini dianggarkan Rp 1,5 miliar untuk harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 1.499.313.299, yang sudah satu paket dengan pemasangan CCTV dan sound system. Lelang pada tahap pertama sudah dilakukan 18-31 Desember 2018 tapi gagal tender, karena dari 7 rekanan yang datar tidak ada yang mengajukan penawaran. Pasar Semarapura blok A dibangun kembali dengan anggaran APBD Klungkung tahun 2018 sekitar Rp 11 miliar sudah kelar Desember 2018. **wan**

Edisi : Selasa, 12 Maret 2019

Hal : 6



GOR di SMKN 3 Negara Terbengkalai

NEGARA, NusaBali

Kondisi gedung GOR di SMKN 3 Negara, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Jembrana semakin memprihatinkan. GOR yang dibangun saat era pemerintahan bupati Jembrana I Gede Winasa, itu kini terbengkalai dan tampak kumuh.

Bagian dinding gedung GOR ini sudah keropos. Sejumlah bagian dinding gedung yang berdebu itu juga dikotori coretan cat semprot. Sampah pembungkus makanan ringan serta minuman berserakan di sejumlah ruangan. Tidak hanya itu, beberapa fasilitas yang tersedia di dalamnya, seperti kasur/matras untuk latihan olahraga tampak compang-camping. Seluruh pintu gedung ini kondisinya rusak, sehingga orang bebas masuk dan keluar, dan diduga ruangan di gedung tersebut kerap dijadikan tempat melakukan hal-hal negatif.

Pemandangan serupa juga terlihat pada kolam renang di sebelah gedung GOR ini. Selain airnya yang tampak keruh, bagian lantai kolam renang dipenuhi lumut. Sejumlah bagian atap kolam renang ini juga keropos. "Memang sudah lama tidak dipelihara, dan sangat disayangkan kondisinya seperti itu. Waktu penyerahan tanggung jawab pengelolaan SMA/SMK ke provinsi beberapa tahun lalu, aset GOR dan kolam renang itu, informasinya ikut diserahkan sebagai aset pem-

prov. Padahal kalau dimanfaatkan, tempatnya bagus, bahkan ada kolam renang," ujar salah seorang warga sekitar, Senin (11/3).

Sementara Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Jembrana Ni Nengah Wartini, mengatakan untuk aset GOR termasuk kolam renang itu memang diserahkan ke provinsi. Namun tahun 2018 lalu, aset GOR serta kolam renang itu diserahkan kembali ke kabupaten. Untuk pemeliharaannya, sementara baru dianggarkan untuk kolam renangnya. "Untuk tahun ini kami baru menganggarkan untuk pemeliharaan kolam renang saja. Sementara untuk GOR-nya, nanti akan dikaji dan dibahas kembali," ujarnya, Senin kemarin.

Menurut Wartini, pihaknya berencana kembali memanfaatkan GOR maupun kolam renang di SMKN 3 Negara, itu agar bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kreativitas generasi muda di bidang olahraga, termasuk menempatkan petugas kebersihan dan petugas jaga untuk memelihara fasilitas tersebut. "Kami tentu berharap, apapun fasilitas yang ada, bisa dimanfaatkan dan dipelihara sebaik-baiknya. Karena saya juga baru di dinas pendidikan, jadi saya masih melakukan penajakan, dan berusaha menata aset-aset yang memang cukup banyak di bawah dinas kami," tuturnya. **ode**

Edisi : Selasa 12 Maret 2019

Hal : 10



8 Kelompok Warga Kembalikan Hibah

Karena penerima hibah merasa tidak mampu menyelesaikan kegiatan yang dimohonkan bantuan hibah.

SEMARAPURA, NusaBali
Delapan kelompok warga

penerima bantuan hibah urusan kebudayaan di Kabupaten Klungkung terpaksa mengembalikan dana hibah sejak Februari 2019. Jumlah dana yang dikembalikan oleh delapan kelompok warga itu tak tanggung-tanggung, Rp 1 miliar lebih.

Pengembalian karena penerima hibah merasa tidak mampu menyelesaikan kegiatan yang dimohonkan bantuan hibah, tepat waktu. Oleh karena itu, dari pada harus berurusan dengan hukum, mereka lebih memilih mengem-

balikan uang negara tersebut.

Senin (11/3), penerima hibah dari Pura Dadia Arya Kenceng, Banjar Cubang, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, senilai Rp 420 juta, mengembalikan dana tersebut ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Klungkung. Namun karena mereka membawa uang tunai yang dibungkus plastik, maka uang itu belum bisa diterima dan yang bersangkutan diminta via transfer. Sebelumnya, ada penerima hibah yang melakukan

hal serupa saat mengembalikan dana ke kas daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Klungkung I Wayan Sumarta mengatakan pengembalian dana hibah harus dilakukan melalui transfer bank ke kas daerah. Karena pengembalian itu tercatat setelah menerima Surat Tanda Setoran (STS). "Kami sudah minta yang bersangkutan untuk transfer ke bank," ujarnya, didampingi Bendahara Bantuan,

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Klungkung, Gusti Ayu Purnami.

Disebutkan, ada delapan kelompok penerima hibah mengembalikan dana ke kas daerah dengan total nominal semua Rp 1.075.500.000. Untuk menghindari permasalahan dikemudian hari mereka memutuskan untuk mengembalikan. "Mereka mengambil langkah ini karena sebelum hibah dicairkan, mereka sudah diberikan sosialisasi," ujarnya. **wan**

Edisi

Selasa, 12 Maret 2019

Hal

6



Dinas LHK Badung Beli 2 Alat Berat Seharga Rp 3 M

MANGUPURA, NusaBali

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Kabupaten Badung menambah dua unit traktor pembersih sampah pada Senin (11/3). Dua alat berat yang rencananya untuk mengoptimalkan penanganan sampah di Pantai Kuta tersebut harganya mencapai Rp 3 miliar.

Kepala Dinas LHK Kabupaten Badung I Putu Eka Merthawan, mengungkapkan guna memaksimalkan penanganan sampah di kawasan Pantai Kuta dan sekitarnya, pihaknya mengerahkan dua traktor baru untuk membersihkan kawasan yang kerap menjadi sasaran sampah kiriman di setiap monsun barat itu. Dia berharap, dengan adanya dua alat berat itu, bisa menunjang tugasnya dalam mengangkut sampah lebih cepat. "Tentunya kita berharap, dua alat ini bisa segera beroperasi dan menunjang kinerja petugas di lapangan. Apalagi, sampah-sampah kiriman di Kuta ini sebagian besarnya sampah kayu. Kalau dua alat ini beroperasi maksimal, akhirnya bisa mempercepat proses penanganan ke STO yang ada," kata Merthawan, Senin (11/3) siang.

Diakuinya, dua traktor tersebut dibeli seharga Rp 1,5 miliar per unit, sehingga untuk dua unit alat berat itu Pem-

kab Badung menggelontorkan dana sebesar Rp 3 miliar. Secara keseluruhan, alat berat tersebut akan dioperasikan pada pertengahan Maret ini.

"Ini *kan* baru diserahkan oleh rekanan (pemenang lelang). Ya, tentu kita berharap dengan sudah diserahkan, akan secepatnya kita operasikan. Tadi (kemarin) kita uji coba di pantai," tutur Merthawan.

Seperti diketahui, Pantai Kuta dan sekitarnya kerap menjadi sasaran sampah kiriman. Sampah berupa ranting, kelapa hingga batang pohon menghiasi sepanjang pantai yang masih menjadi primadona para turis. Di tengah gempuran sampah itu, petugas Dinas LHK sering mengalami kendala saat melakukan evakuasi, terutama alat berat terhalang oleh sampah-sampah tersebut. Dengan adanya dua mesin baru yang memiliki ukuran lebih besar, diharapkan bisa menyelesaikan persoalan sampah. "Kalau selama ini *kan* kita sering menghadapi kendala soal penanganan sampah. Berbagai faktor yang menyebabkannya, baik itu cuaca maupun alat berat. Nah, semoga dengan adanya (alat berat) ini, bisa mengatasi kendala penanganan sampah," kata Merthawan. **dar**

Edisi : 12 Maret 2019, Selasa

Hal : 2



Matatah Massal Dibiayai APBDes

AMLAPURA, NusaBali

Pemerintah Desa Peringsari, Kecamatan Selat, Karangasem menggelar upacara matatah (potong gigi), otonan, dan pawiwahan massal pada Soma Kliwon Uye, Senin (11/3). Biaya Manusia Yadnya ini bersumber dari APBDes tahun 2019. Peserta matatah, otonan, dan pawiwahan digratiskan. Ini merupakan program pertama kalinya upacara Manusia Yadnya massal menggunakan dana desa.

Manusa Yadnya yang digelar di Kantor Desa Peringsari ini tiga sulinggih yakni Ida Pedanda Gede Made Putra Lusuh dari Geria Celit, Ida Rsi Begawan Waraspati dari Geria Padangaji Banjar Padangaji Kangin, dan Ida Pandita Mpu Dukuh Jayati dari Geria Badeg Dukuh.

Peserta matatah missal 186 orang, otonan 162 orang, dan 12 pasang pengantin tua menggelar upacara merebu (tipat bantal). Matatah missal dilayani enam sanggih di enam tempat sehingga matatah selesai lebih awal. Ketua Panitia I Gusti Bagus Mantra.

Perbekel Desa Peringsari, I Wayan Bawa, mengatakan program yang dijalankan pertama kali ini melayani krama kurang mampu. "Kami baru pertama melakukan terobosan, membantu krama kurang mampu, upacara Manusia Yadnya. Ternyata antusias dapat apresiasi masyarakat," katanya.

Disebutkan, program matatah, otonan, dan pernikahan massal menghabiskan biaya Rp 100,5 juta dari APBDes.

Peserta matatah, otonan,



● NUSABALI/NANTRA

Krama yang ikut matatah massal berdesak-desakan di Kantor Desa Peringsari, Banjar Siladumi, Desa Peringsari, Kecamatan Selat, Karangasem, Senin (11/3).

dan pernikahan hanya dibebani masing-masing wajib membawa peras ayaban. Khusus untuk krama yang matatah juga diwajibkan

membawa satu butir klungah nyuh gading (kelapa muda), untuk tempat berkumur saat potong gigi. Mengingat lokasi upacara sangat sempit, maka

prosesnya dibagi tiga tahapan. Tahap pertama menggelar upacara matatah massal. Disusul tahap II upacara otonan, dan paling terakhir upacara pernikahan ditandai upacara mabiakala dan natab banten.

Khusus untuk krama yang melangsungkan pernikahan diikuti 12 pasang, merupakan pengantin tua.

Ni Putu Ayu Sudiarmi dari Banjar Umasari Kauh, Desa Peringsari ikut matatah massal, hanya membawa banten ayaban dan satu butir klungah. "Kami tidak mengeluarkan biaya apa-apa kecuali banten ayaban dan sebutir klungah," kata Ni Putu Ayu. Begitu juga menurut I Kadek Arya Ardita dari Banjar Lusuh Kauh yang ikut upacara otonan, tanpa mengeluarkan biaya. **k16**



Warga Desak Pemkab Gianyar Amankan Aset Tanah

GIANYAR, NusaBali

Puluhan hektare tanah yang menjadi aset Pemkab Gianyar hingga kini status kepemilikannya tak jelas alias ngambang. Karena aset-aset tanah tersebut belum bersertifikat meski status penguasaannya di tangan Pemkab maupun Pemprov Bali. Terkait kondisi itu, sejumlah warga mendesak agar Pemkab Gianyar tegas dalam mengamankan aset tersebut.

Desakan itu disampaikan sejumlah warga dalam beberapa kali kesempatan kepada jajaran DPC Garda Tipikor Indonesia (GTI) Kabupaten Gianyar. Tak hanya itu, pemerintah juga wajib melindungi hak-hak atas aset tanah tersebut baik milik aset warga perorangan, kelompok, aset adat, aset pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan aset negara. "Pemerintah harus punya alat bukti sah agar tak sekadar main klaim sebagai penguasa aset tanah. Masyarakat juga harus dapat contoh dari pemerintah tentang tertib aset yang baik dan benar," jelas Ketua DPC GTI Kabupaten Gianyar Pande Mangku Rata, di Gianyar, Senin (11/3).

Pande Mangku Rata menilai pensertifikatan tanah aset merupakan langkah preventif agar aset-aset tersebut tak terus-terusan menjadi objek sengketa. Konflik-konflik warga yang berobjek tanah juga akan dapat dihindari sedini mungkin. "Kasus rebutan tapal batas desa di Gianyar, misalnya, juga karena ketidakpastian antar pihak dalam kepemilikan bukti tanah," tegasnya. Jika ada legalitas aset sah, lanjut Mangku, praktik percaloan tanah Negara juga akan tercegah. Kasus rebutan aset tanah antara pemerintah dan warga, antara lain lahan SD Inpres, juga karena ketidakpastian bukti hak milik tanah. Legalitas tanah-tanah untuk

jalan menuju bendungan yang dulunya dibeli Dinas PU, juga tak jelas.

Oleh karena itu, Mangku menilai program pensertifikatan tanah oleh Presiden RI Joko Widodo wajib didukung semua komponen, terutama pemerintah di daerah. "Dengan program ini, beban aparat kepolisian dalam pengamanan kasus rebutan aset tanah pasti berkurang," ujarnya. Aktivis anti korupsi ini mengaku akan bangga jika Bupati Gianyar Made Mahayastra dan jajaran berhasil mengamankan aset daerah dan aset warga secara baik dan benar.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Kabupaten Gianyar Ida Bagus Sudewa menyatakan telah mendeteksi ada sekitar 80 titik tanah aset Pemkab Gianyar yang wajib disertifikatkan. Dari jumlah itu, kebanyakan tanah-tanah lokasi SD Inpres Tahun 1978. Ada juga tanah hasil penukar tanah sekolah yang harus disertifikatkan. "Tak mudah untuk pensertifikatan. Karena dari 80 titik tanah aset ini, kebanyakan masih bermasalah," jelas mantan Kadis PU Gianyar era Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata (2013-2018) ini.

Karena kebanyakan tanah bermasalah, papar Ida Bagus Sudewa, tahun 2018 Dinas Perkimta hanya bisa menyertifikatkan lima aset dengan lima sertifikat, dan tahun 2017 hanya 10 sertifikat. Jumlah ini relatif kecil dibandingkan target pensertifikatan tanah aset Pemkab Gianyar 20 sertifikat/tahun. "Pensertifikatan ini gratis dari Badan Pertanahan. Ada anggaran pensertifikatan aset ini Rp 75 juta untuk tahun 2018. Anggaran ini untuk biaya rapat-rapat dan koordinasi lintas terkait," jelasnya. **Isa**

Edisi : Selasa, 12 Maret 2019

Hal : 6